

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK SANTRI SEBAGAI
PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN 2019
(Studi di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

EKA AGUSTINE SOFYANA

NPM : 1521020023

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK SANTRI SEBAGAI
PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN 2019
(Studi di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

EKA AGUSTINE SOFYANA

NPM : 1521020023



Pembimbing I: Dr. Iskandar Syukur, M.A

Pembimbing II: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Kajian skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri sebagai pemilih pemula pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 tepatnya di Pondok Pesantren Roudlotussholihin. Skripsi ini dilatar belakangi bahwasannya santri sebagai pemilih pemula belum pernah mengikuti suatu pemilihan umum, sehingga pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, merupakan pengalaman tersendiri. Terlepas dari pengalaman itulah, kesadaran santri untuk menggunakan hak pilihnya sangatlah penting. Rumusan masalah skripsi ini yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan Pilpres Tahun 2019 dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap partisipasi politik pemula pada Pilpres Tahun 2019 di Pesantren Roudlotussholihin. Adapun yang menjadi tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan Pilpres Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara sebagai metode utama dan metode dokumentasi sebagai metode pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka, yaitu pendidikan politik yang hanya didapat di sekolah dan para seniornya menjelang pemilu, faktor karakteristik seseorang yaitu adanya relasi antara Santri dan para Kyai nya yang sangat erat, dan faktor karakteristik individu, yaitu perbedaan pemahaman disetiap individu, sehingga berbeda pula kesadaran politik mereka. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, yaitu jika dilihat dari keikutsertaan Santri Roudlotussholihin dalam menyalurkan hak sebagai warga negara dengan cara memberikan suara pada pemilu 2019 merupakan suatu kegiatan politik atau merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin sebagai rujukan Q.S an-Nisa ayat 59. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Santri pemilih pemula di Pesantren Roudlotusholihin yaitu Adanya rangsangan politik, yaitu adanya relasi antara Kyai dan Santri, Adanya faktor pendidikan, kesadaran politik dan sikap ingin tahu, domisili yang jauh untuk untuk dijangkau, sehingga membutuhkan waktu luang dan biaya yang banyak dan faktor lainnya yang terdapat pada diri Santri, seperti sifat malas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan bernegara. Berkenaan dengan partisipasi politik termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Maka dari itu kesadaran politik Santri pemilih pemula sangat diperlukan, semakin tinggi kesadaran Santri pemilih pemula tentang pentingnya ikut serta dalam proses politik yang bertujuan untuk membangun negara, maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

**Judul : ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PARTISIPASI POLITIK SANTRI SEBAGAI
PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 (Studi di
Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-
Lampung Tengah)**

Nama : EKA AGUSTINE SOFYANA

NPM : 1521020023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Siyasa

Menyetujui

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A
NIP. 196603301992031002

Dr. Hj. Nurnazli, S.H.S.Ag.M.H
NIP. 197111061998032005

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Aliekhel Hendro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : ANALISIS FIQIH SIYASAH
TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PARTISIPASI POLITIK SANTRI SEBAGAI PEMILIH
PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN 2019 (Studi di Pondok Pesantren Roudlotussholihin
Purwesari-Lampung Tengah) disusun oleh: EKA AGUSTINE
SOFYANA, NPM: 1521020023, Jurusan: Hukum Tata Negara
(Siyasah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas
Syar'iah pada Hari/Tanggal: Jum'at 19 juni 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.M.H (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag (.....)

Penguji Utama : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)

Penguji Pendamping 2 : Dr.Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung



Dr. H. Khairuddin, M. H.
NIP. 196210221993031002

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰى ءَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

(Q.S An-Nisa ayat: 59)



¹ Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 59

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini teruntuk:

1. Bapak dan Mamak, betapa buah hatimu tak dapat membalas setiap pengorbanan dan doa yang tak henti-hentinya terpanjatkan demi membesarkan dan kebahagiaan untuk putri sulung mu dengan harapan menjadi insan yang berguna dan selalu taat kepada perintah Allah swt.
2. Adik-adik ku, Roro Miftahul Jannah dan Khoerunnisa yang tersayang, yang menjadi penyemangat. Terimakasih atas motivasi dan doa dalam menggapai cita-cita ku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Eka Agustine Sofyana, seseorang yang lahir pada tanggal 03 Agustus 1997 di desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Merupakan anak pertama dengan memiliki dua adik perempuan bernama Roro Miftahul Jannah dan Khoerunnisa. Dengan rasa syukur kepada Allah yang telah menjadikan ku seorang anak yang lahir dari Bapak Muhammad Jamani dan Ibu Sopiya, yang selalu mengajarkan arti kesabaran dan pantang menyerah dalam hidup, serta tak pernah henti mengajarkan untuk selalu taat dengan perintah Allah swt.

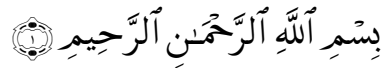
Pendidikan berawal pada tahun 2002 di TK Nurul Islam Jatinegara-Jakarta Timurlulus pada tahun 2003. Sekolah Dasar Negeri 12 Petang Jatinegara-Jakarta Timur hanya sampai kelas 3 (tiga) di tahun 2006 dan kemudian melanjutkan kembali di Sekolah Dasar Negeri 02 Sukamanah-Cikarang hingga lulus pada tahun 2009. Madrasah Tsanawiyah al-Huda Bandung Baru-Pringsewu lulus pada tahun 2012. Setelah itu, Madrasah Aliyah Roudhotul Huda lulus pada tahun 2015. Kemudian langsung melanjutkan dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,
Penulis,

2020

EKA AGUSTINE SOFYANA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah swt, yang senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya berupa kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyyana wa Habibana Muhammad SAW. para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan Syafaat kelak di akhir Kiamat. *Aaamiiinnn.*

Skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah) dibuat dan diajukan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan bantuan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis berterimakasih secara moril maupun materil, khusus rasa hormat penulis hatirkan kepada :

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Frengki, M..Si. selaku Ketua Jurusan dan sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

3. Dr. Iskandar Syukur, M.A selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Nurnazli S.H, S.Ag, M.H Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keiklasan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Staf dan Karyawan tata usaha, perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan dan penelitian.
6. Bapak Saiful Hasan dan Ibu Khotimatus Sa'adah selaku Mudier Pondok Pesantren Roudlotussholihin yang Purwosari Lampung Tengah yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
7. Tandes Diansyah Prayoga dan Hidayatus Sholihah selaku Pengurus Pondok Pesantren Roudlotussholihin yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penelitian ini.
8. Muhammad Rohman Albiyansyah, yang senantiasa memberikan dukungan Serta tulus mendoakan ku sehingga dapat meenyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ranti Alfiani dan keluarga terimakasih atas bantuan, dukungan, dan doa sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat ku tercinta, Raihana, Sheila Pertiwi Kumalarati.,S.H, Visca Ayuni.,S.H, Riga Nova.,S.H Reka, Afni Prastiwi, memberikan doa dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman Toko Boss Aldo yang juga memberikan dukungan dan doanya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN kelompok 69 Budilestari Tanjung Bintang, dan PPS, teman-teman Siyasah angkatan 2015, khususnya Siyasah kelas B yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberiku semangat.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan, dicatat sebagai amal ibdah oleh Allah SWT, *aaamiin*. Penulis menyadari dengan sepenuhnya, skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini, bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembacaa umumnya. *Aaaamiiinn ya Rabbal`alamin*.

Bandar Lampung, 20 Januari 2020

Penulis,

EKA AGUSTINE SOFYANA

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penulisan.....	10
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	23
1. Partisipasi Politik	23
a. Partisipasi Politik	23
b. Faktor-faktor Partisipasi Politik	35
c. Tipologi Partisipasi Politik.....	36
d. Tujuan dan Fungsi Partisipasi Politik	39
2. Pemilih Pemula.....	40
a. Teori Pemilih Pemula.....	40
b. Ciri-ciri Pemilih Pemula	41
c. Pembelajaran Politik pada Pemilih Pemula	42
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik	

Pemilih Pemula	46
3. Partisipasi Politik dalam Fikih Siyasah	49
a. Bentuk Pemilihan Umum dalam Islam	49
b. Sejarah Pemilu Dalam Islam	51
c. Teori Konsep Syura.....	55
d. Pandangan Fikih Siyasah terhadap Partisipasi Politik	59
B. Tinjauan Pustaka	63
BAB III: DEKSRIpsi OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek.....	66
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Roudlotussholihin	66
2. Profil Pondok Pesantren Roudlotussholihin.....	67
3. Visi, Misi Dan Tujuan Pondok Pesantren Roudlotussholihin.....	72
4. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Roudlotussholihin.....	73
B. Pandangan Santri Pemilih Pemula Terhadap Pemilu	75
1. Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Menurut Pandangan Santri Pemilih Pemula	75
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut Pandangan Santri Pemilih Pemula	76
3. Partisipasi Politik Menurut Pandangan Santri Sebagai Pemilih Pemula	76
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Pemilih Pemula	77
5. Pendapat Santri Pemilih Pemula Mengenai Keikutsertaan dalam Pemilu di Komplek Pesantren	83
BAB IV: ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin dalam Pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden	86
B. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin dalam Pelaksanaan Presiden Dan Wakil Presiden. .	95
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Rekomendasi.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Data Kitab Kajian Pokok Pondok Pesantren Roudlotussholihin	70
2. Struktur Kepengurusan Santri Putra Pondok Pesantren Roudlotussholihin	73
3. Struktur Kepengurusan Santri Putri Pondok Pesantren Roudlotussholihin	74



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Instrumen Wawancara Dengan Santri.....	107
2. Instrumen Wawancara Dengan Informan	108
3. Hasil Dokumentasi	109
4. Kartu Konsultasi.....	118
5. Surat Permohonan Izin Riset.....	120
6. Surat Izin Mengadakan Riset dari Badan Kesbang dan Politik Daerah	121
7. Surat Permohonan Izin Riset.....	122
8. Surat Izin Mengadakan Riset dari Mudzir Pondok Pesantren Roudlotussholihin.....	123
9. Hasil Similarity Turnitin	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul pada penelitian ini adalah “ Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah)”. Untuk menghindari berbagai macam taksiran judul di atas, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul berikut ini :

1. Faktor-faktor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia faktor adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Dengan demikian, peneliti akan menggali lebih dalam dengan menganalisis atau menelaah keadaan yang menyebabkan atau mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada Pemilu khususnya Presiden dan Wakil Presiden 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi Santri sebagai pemilih pemula, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Modernisasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang

dilakukan warga Negara untuk terlihat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.¹

Sedangkan menurut Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.²

3. Santri Pemilih Pemula

Secara umum, Santri adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, biasanya santri menetap hingga pendidikannya selesai. Seperti halnya di Pondok Pesantren Roudlotussholihin, selain menimba ilmu di pesantren akan tetapi juga menimba ilmu di pendidikan formal seperti biasanya, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), hingga Perguruan Tinggi.

Pada pasal 1 ayat 22 UU NO 10 Tahun 2008 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat 1 dan 2 UU NO 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara

¹ Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Partisipasi Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press) hlm. 67

² Ibid. hlm. 68

Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.³

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan santri pemilih pemula pada judul skripsi ini adalah seorang Santri yang baru mengikuti pemilu pertama kali sejak pemilu diadakan dengan rentang usia 17-21 tahun.

4. Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴

Pemilihan umum itu sendiri merupakan salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil. Karenanya, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu.

Dari pengertian diatas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pancasila

³UU NO 10 TAHUN 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (On-line), tersedia di : http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_10.pdf diakses pada tanggal 13 juli 2019 pukul 13:39 wib

⁴UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (On-line), tersedia di : http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_22.pdf diakses pada tanggal 13 juli 2019 pukul 14:02 wib

dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses pemilihan secara langsung.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019” adalah menganalisis suatu keadaan yang menyebabkan atau yang mempengaruhi partisipasi politik santri pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan Peneliti memilih judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Karena ingin menjelaskan pentingnya partisipasi politik dalam bentuk ikut serta pada pemilihan umum, kepada Santri, khususnya pemilih pemula Pondok Pesantren Roudlotussholihin dalam rangka pembentukan kepribadian muslim yang peduli dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Alasan Subyektif

Judul skripsi ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan yaitu jurusan Hukum Tata Negara serta didukung oleh ketersediaannya literatur baik data maupun sekunder yang menunjang dalam penelitian tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵

Pemilihan umum itu sendiri merupakan salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil. Karenanya, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu.

Sebagai warga Negara, Santri juga memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan bangsa salah satunya ikut serta dalam pemilihan umum. Namun, salah satu kendala bagi Santri adalah kurangnya pengetahuan dan informasi terkait perkembangan politik terkini. Hal tersebut tentu dilatarbelakangi oleh kegiatan sehari-hari dan peraturan yang ketat di Pondok Pesantren.⁶

Kultur dan peraturan pondok Pesantren seringkali mengikat santri sehingga santri tidak memiliki kebebasan seperti remaja umum seusianya. Keterbatasan santri terutama dalam menggali informasi tentang kehidupan masyarakat terutama dalam hal kehidupan sosial politik. Sistem kurikulum

⁵UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (On-line), tersedia di : http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_22.pdf diakses pada tanggal 13 juli 2019 pukul 14:02 wib

⁶Rofik Anwar. *Partisipasi Politik Santri Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pilpres 2014*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014) (On-line) tersedia di, http://digilib.uin-suka.ac.id/14516/2/10370022_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf.diakses pada bulan Juli 2019.

di Pondok Pesantren yang padat membuat para santri hanya memfokuskan diri pada pembelajaran yang sudah ditetapkan. Hal ini menyebabkan para santri sulit menggali pengetahuan-pengetahuan lain selain yang telah tercantum dalam kurikulum. Selain itu lingkungan belajar yang umumnya tertutup menyebabkan para santri kurang dapat menyerap informasi-informasi yang berada diluar lingkungan pesantren, termasuk informasi terkait politik lokal atau pemilu.⁷

Di Pondok Pesantren para santri diajarkan dan dibimbing dalam ilmu-ilmu agama oleh seorang kiai. Kiai sendiri merupakan pimpinan Pondok pesantren yang merangkap juga sebagai guru pengajar bagi para Santri, lebih dari itu kiai dianggap sebagai guru besar dalam sebuah lingkungan Pondok Pesantren. Hubungan sosial yang terbangun antara Santri dan Kiai merupakan hubungan yang bertujuan untuk belajar ilmu agama atau biasa dikatakan hubungan interpersonal. Selain sebagai guru, Kiai sendiri dianggap sebagai pengganti orang tua oleh para santri selama mengemban proses belajar di Pondok Pesantren.⁸

Santri sebagai pemilih pemula tentu belum pernah mengikuti suatu pemilihan umum, sehingga pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, merupakan pengalaman tersendiri. Terlepas dari pengalaman itulah, kesadaran santri untuk menggunakan hak pilihnya sangatlah penting. Kesadaran ini menyebabkan adanya keinginan Santri untuk melibatkan langsung dalam proses

⁷Rofik anwar. ibid.

⁸Ibid

pemilihan umum. Kesadaran ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan Santri terkait berapa usia yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilih, yaitu usia 17 tahun atau lebih. Menyadari betapa pentingnya pemilihan umum sebagai sarana demokrasi yang berarti dapat menentukan masa depan bangsa, maka sangat diperlukan partisipasi aktif dalam pemilihan umum terutama pemberian suara.

Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah *As-siyasah* dalam mempelajari dispesifikasikan kedalam ilmu fikih siyasah. Di dalam Ilmu Fikih Siyasah diatur bagaimana cara bersikap subjek dari politik atau siyasah sendiri. Ketaatan rakyat kepada seorang pemimpin merupakan sebuah perintah dalam agama dan itu artinya sebuah kewajiban bagi rakyat untuk ikut dalam menentukan siapa pemimpinnya, dalam Quran Surah an-Nisa ayat 59 :⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa ayat 59)

⁹ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran.(Jakarta: CV Diponegoro)

Dari ayat al-Quran diatas, dapat dipahami bahwa setiap orang wajib mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan pemimpin di antara mereka. Berkenaan dengan partisipasi politik itu termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya.

Hasil data prasurvei yang didapat menyebutkan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari merupakan sebuah institusi pendidikan yang didalamnya terdapat lembaga pendidikan formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Perguruan Tinggi, serta lembaga-lembaga non formal yaitu Madrasah Diniyah, tentunya terdapat beragam varian usia, karakteristik individu masing-masing, dan berbagai pemahaman terutama mengenai partisipasi politik.

Masalah partisipasi politik Santri sangat menarik untuk ditelaah dalam artian partisipasi politik yang dimaksudkan bukanlah dilihat hasil jumlah suara semata, akan tetapi dilihat dari kemampuan santri dan tingkat kesadaran santri dalam berpartisipasi pada pemilu sesuai dengan hati nurani tanpa ada tekanan dari pihak lain.

Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor partisipasi politik pemilih pemula dalam pilpres 2019 khususnya para santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin maka perlu diadakan penelitian di Yayasan Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari Lampung Tengah. Dari latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian

dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah)”

D. Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu area spesifik yang akan diteliti. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian.

Didalam penelitian ini yang menjadi titik fokus penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pesantren Roudlotusholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang didapat yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik Santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan Pilpres tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilpres tahun 2019 di Pondok Pesantren Roudlotussholihin?

F. Tujuan Penulisan

Adanya penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pilpres tahun 2019 oleh Santri pemilih pemula di Pondok Pesantren Roudlotussholihin.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilpres tahun 2019 di Pondok Pesantren Roudlotussholihin.

G. Signifikasi Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan.
 - b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang politik.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2019.

- b. Bagi pemilih pemula (generasi muda), mengetahui pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu yang demokratis.
- c. Bagi aktivis partai politik dan tokoh politik, agar mereka lebih meningkatkan peran serta kegiatan partai politik pada pemilih pemula dimasa yang akan datang.
- d. Bagi fakultas Syariah dan Hukum, untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.
- e. Bagi masyarakat khususnya para santri, untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terhadap ilmu politik dan menambah pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik pemilih pemula.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mencari data lapangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, Peneliti menggunakan jenis penelitian dekriptif analitik. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran, dan bukan dengan angka. Jenis penelitian ini diterapkan dengan metode kualitatif.¹⁰

Menurut Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya

¹⁰ Susiadi, ibid. hlm 5

deksriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain. Dalam peneltian kualitatif perlu ditekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realita.¹¹

Dalam hal ini diharapkan mampu menjaring realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokkan disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya.¹²

Berdasarkan sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

¹¹ Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010) hlm. 42

¹² Ikbal Hasan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002) Hlm 8

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga asli atau baru¹³.

Sumber data primer yaitu responden, yang merupakan objek dari penelitian. Dari responden inilah, peneliti dapat mencari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah Santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari yaitu pemilih pemula yang terdaftar dan mempunyai hak pilih pada pemilu Presiden tahun 2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui data lapangan yang menjadi data pendukung dari data primer atau bersumber dari data tertulis berupa buku dan karya ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu.

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

a. Partisipan Penelitian

Partisipan adalah Pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga,

¹³Ikbal Hasan. Ibid. Hlm 10

pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

Diskusi tentang partisipan dan lokasi penelitian mencakup 4 (empat) aspek, yaitu :

1) Setting (lokasi riset)

Lokasi riset yang akan dijadikan sebagai latar dalam memperoleh data yang dapat tercapainya tujuan penelitian yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Roudlotussholihin.

2) Aktor (siapa yang akan diobservasi dan diinterview)

Aktor yang dijadikan titik fokus oleh peneliti adalah santri pemilih pemula Pondok Pesantren Roudlotusholihin.

3) Peristiwa (apa yang dilakukan oleh aktor)

Peristiwa yang dilakukan santri pondok pesantren roudlotusholihin pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini peneliti berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepartisipasian santri tersebut.

4) Proses (proses terjadinya peristiwa yang dilakukan aktor dalam setting tertentu)

Partisipasi politik santri tentu sangat berbeda dengan partisipasi politik masyarakat pada umumnya. Hal ini

dikarenakan ketatnya peraturan yang menyebabkan santri kurang akan pengetahuan dan informasi para perilaku politik. Seperti, tidak diperbolehkannya memegang handphone dan media informasi lainnya, dan jauhnya kampung halaman. Akan tetapi, santri sangatlah berantusiasme pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, terutama bagi santri pemilih pemula merupakan pengalaman pertamanya. Maka dari itu, peneliti memfokuskan pada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri Pondok Pesantren Roudlotussholihin.

b. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Roudlotussholihin yang merupakan pesantren salafiyah di desa Purwosari kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan yang dilakukan observer, maka observasi dibedakan menjadi dua yaitu, *observasi partisipan* (pengamatan terlibat) dan *observasi*

tak partisipan (pengamatan tidak terlibat).¹⁴ Dikarenakan peneliti berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan, maka observasi yang dipakai peneliti disebut *observasi tak partisipan*. Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data variabel apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri sebagai pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu 2019 dan juga untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diatas.

b. Teknik Wawancara

Metode interview menurut Lexy J. Moleong adalah Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵

Menurut Sugiyono Interview (wawancara) dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa

¹⁴Susiadi,ibid. hlm 115

¹⁵ Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006) hlm.135

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpul datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁶

3) Wawancara bebas terpilih

Wawancara bebas terpilih adalah kombinasi keduanya, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.¹⁷

Jenis interview (wawancara) yang diterapkan dalam penelitian ini adalah interview terstruktur, yaitu pelaksanaan wawancara telah mempersiapkan instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Interview diajukan kepada sampel yang telah dipilih peneliti, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi serta untuk mengetahui gambaran umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

¹⁶ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, an R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.194-197

¹⁷ Chalid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 83

partisipasi politik santri pemilih pemula pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Guna memperoleh validitas data, peneliti akan memilih beberapa sampel dari jumlah populasi yang ada untuk diwawancarai agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dapat mewakili populasi.¹⁸

Populasi yang dimaksud peneliti yaitu, jumlah keseluruhan Santri pemilih pemula di Pondok Pesantren Roudlotussholihin sekitar 798 populasi santri.

Sedangkan sampel yang dimaksud peneliti yaitu Santri pemilih pemula di Pondok Pesantren Roudlotussholihin yang terpilih dan sudah terdaftar sebagai pemilih dan pengurus Pondok Pesantren Roudlotussholihin yang nantinya akan diwawancarai oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu teknik *purposive sampling*, yaitu sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, persyaratan yang dibuat sebagai

¹⁸Susiadi. *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi penerbitan fakultas Syaariah, UIN Raden Intan Lampung, 2014)hlm 81

kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.¹⁹ Teknik ini adalah salah satu teknik *Non Random Sampling* yaitu tidak semua individu dalam populasi dapat diberi peluang yang sama menjadi sampel, pengambilan sampel ditentukan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁰

Maka dari itu, sampel yang digunakan pada skripsi ini yaitu antara lain:

- 1) Santri laki-laki (3 orang) dan Santri perempuan (3 orang) mereka adalah responden sampel utama.
- 2) Pengurus Santriwan (1 orang) dan pengurus Santriwati (1 orang) mereka adalah *informan* pendukung guna memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan sesuai dengan bahasan skripsi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan data dengan cara pengamatan, pencatatan yang bersifat verbal. Dokumentasi dapat berupa foto, rekaman, gambar, atau dokumen-dokumen terdahulu.²¹

Data-data yang diperoleh dari dokumentasi adalah:

- 1) Dokumen data diri Santri

¹⁹ P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). H. 31

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM, 1973), h.80.

²¹ Susiadi. Ibid. H 81

- 2) Sejarah singkat Pondok Pesantren
- 3) Profil Pondok Pesantren
- 4) Visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren
- 5) Struktur pengurus Pondok Pesantren
- 6) Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren
- 7) Jadwal kegiatan santri Pondok Pesantren
- 8) Peraturan Pondok Pesantren

5. Prosedur Analisis Data

Analisis merupakan suatu usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan rumusan yang telah tersusun. Dalam penelitian kualitatif, Lexy Moleong menjelaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data adalah pemrosesan satuan (unitizing), kategorisasi dan penafsiran data.²²

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dibagi menjadi dua yaitu, analisis data statistik dan analisis data non statistik. Mengingat data penulisan ini tidak berupa hasil melainkan proses maka analisis yang digunakan adalah analisis data non statistik, yang disebut juga analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya. Analisis data dilakukan terbatas pada teknik pengolahan data nya seperti pada pengecekan data

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya. 2017), h. 288

dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran.²³

Data dianalisis dan diolah dengan cara :

- a. Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber di lapangan yang mendukung penelitian ini.
- b. Reduksi data, yaitu Reduksi data dilakukan dengan menelaah kembali seluruh catatan lapangan dan studi dokumentasi. Telah dilakukan untuk menemukan hal-hal yang pokok atau penting berkenaan dengan fokus penelitian. Dengan kata lain reduksi data dimaksud untuk menyederhanakan, memilih dan menilai data dan informasi yang berhubungan dengan pokok-pokok penelitian.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah suatu tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya yaitu merupakan validitasnya. Setelah seluruh data dikumpulkan kemudian dianalisis secara logis, maka diperoleh kesimpulan yang didalamnya mencakup jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan

²³Lexy J. Moleong, *ibid.* h. 289.

itu, peneliti memberikan solusi kongkrit yang konstruktif sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan sebagai masukan bagi santri pemilih pemula lainnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Partisipasi Politik

a. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya individu terdorong untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.²⁴

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara²⁵.

Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam

²⁴Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2011), 92.

²⁵Syahrial syarbini (dkk),*Sosiologi Dan Politik*,(Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001)h.69.

kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*publicpolicy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.²⁶

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.²⁷

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak

²⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), H.367.

²⁷Fatahullah Jurdi, *Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 46.

menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.²⁸ Secara sederhana, partisipasi politik merupakan peran serta masyarakat terhadap sebuah atau berbagai kegiatan dalam kehidupannya yang sifatnya social (memasyarakat).

Kesimpulan dari pengertian diatas, partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin atau pun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Milbrath, dikutip dalam buku Pengantar Sosiologi Politik karya Rafael Maran, menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik.²⁹

²⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), H.371.

²⁹Raga Maran, Rafael. 2007.*Pengantar Sosiologi Politik*.(Jakarta:Rineka Cipta Indonesia, 156) dikutip oleh Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, *Artikel* (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h. 6.

Lima faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain:

1) Adanya perangsang politik.

Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi formal maupun informal.

2) Faktor karakteristik pribadi seseorang.

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.

3) Karakteristik sosial.

Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

4) Situasi atau lingkungan politik itu sendiri.

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas

dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

5) Pendidikan Politik.

Adapula yang menambahkan pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya.

Selain faktor pendukung, disebutkan pula faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain³⁰ :

1) Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah.

Maksud dari kebijakan induk selalu berubah yaitu, organisasi atau badan yang dipandang elite politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi.

2) Pemilih Pemula yang Otonom.

Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada

³⁰Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h 7 diakses pada bulan oktober 2019.

dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi.

3) Dukungan yang Kurang Dari Induk Untuk Mensukseskan.

Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula, komunikasi dengan induk organisasi harus terjalin baik dan tetap harus diperhatikan.³¹

Suwondo menerangkan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu³²:

1) Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi membentuk sikap dan tindakan masyarakat untuk melakukan pilihan dipemilihan umum. Pendekatan sosiologis melihat dari pendekatan pada pentingnya peranan kelas atas preferensi seseorang. Pendekatan ini menyakini bahwa kelas merupakan basis pengelompokan politik, sebab partai-partai politik tumbuh dan berkembang berdasarkan kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat yang berlainan karena kepentingan ekonomi masing-masing.³³

Pendekatan partisipasi tidak hanya didasarkan kepada perbedaan kelas tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat

³¹Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h 7 diakses pada bulan oktober 2019.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

pendapatan seseorang, daerah tinggal seseorang, pekerjaan seseorang dan lain sebagainya, khususnya berkaitan dengan sisi sosiologis³⁴. Contohnya yaitu:

- a) Individu/masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya sebagai “*orang kecil*” akan memberikan suaranya kepada calon anggota partai politik yang mempunyai *positioning* dengan cara mengidentifikasikan dirinya seperti rakyat pemilih sebagai partai *wong cilik*.³⁵
- b) Rakyat pemilih yang tinggal di suatu daerah/bekerja disuatu kantor/bekerja disuatu tempat, yang kebetulan daerah atau kantor atau tempat tersebut dikenal sebagai basis suatu sekelompok tertentu, sehingga secara tidak langsung akan memilih calon-calon anggota legislatif dan partai politik ditempat tinggalnya atau ditempat mereka bekerja.
- c) Masyarakat/individu yang berpendidikan tinggi akan memilih calon-calon anggota partai politik yang mengidentifikasikan diri pemilihnya sebagai orang-orang pintar atau cendikiawan.³⁶
- d) Dilihat dari sisi pekerjaan, akan ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa, pemilih yang bekerja sebagai guru akan memilih calon anggota partai politik yang

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.* H. 8.

³⁶*Ibid.* H. 8.

berasal dari golongan guru pula, para pegawai di kantor atau suatu dinas akan cenderung memilih calon anggota legislatif yang berasal dari lingkungan mereka sendiri dan seterusnya.³⁷

Penjelasan mengenai pendekatan sosiologis ini diperjelas lagi bahwa, mengenai pengkategorian karakteristik sosial dan pengelompokan sosial ini dibagi menjadi tiga tipe yakni:

- a) Kelompok pertama kategorial yang terdiri atas orang-orang yang memiliki karakteristik politik yang berbeda-beda dan tidak menyadari karakteristik dan tujuan kelompoknya. Dimana perbedaan ini terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap peristiwa politik, pengalaman politik dan peran-peran sosial.³⁸ Pengelompokan kategori ini terbentuk atas dasar faktor-faktor perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan perbedaan pendidikan.
- b) Kategori kedua adalah kelompok skunder yang menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya dan terdapat ikatan psikologis anggota terhadap kelompoknya, kelompok ini di klasifikasi seperti pekerjaan, kelas sosial dan status sosial

³⁷ Agus Muslim, "faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat", (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h 8 diakses pada bulan oktober 2019.

³⁸ Adman Nursal. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004) h. 56.

ekonomi, dan kelompok-kelompok etnis seperti ras, agama, dan daerah asal.³⁹

- c) Tipe kelompok terakhir adalah kelompok primer yang terdiri atas orang-orang yang melakukan kontak dan interaksi langsung secara teratur dan sering, kelompok ini memiliki pengaruh yang paling kuat dan langsung terhadap perilaku politik seseorang. Mereka yang tergolong kelompok ini adalah pasangan suami-istri, orang tua dan anak-anak dan teman sepermainan.⁴⁰

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan sosiologis ini akan menekankan pada dua aspek yaitu :

- a) Pengelompokan sosial dilihat dari pola hubungan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan serta kelompok sosial lainnya seperti profesi dan organisasi yang diikuti.
- b) Karakteristik sosial yang dilihat orientasi pemilih terhadap karakteristik sosial kandidat seperti usia, jenis kelamin, agama, etnis, dan lain-lain.⁴¹

2) Pendekatan Psikologis

Pendekatan yang lebih memberikan penekanan kepada faktor psikologis dari pemilih itu sendiri. Pendekatan psikologis,

³⁹Adman Nursal. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004) h. 56.

⁴⁰Ibid. H 59.

⁴¹Ibid. H 56.

menjelaskan bahwa partisipasi politik beratkan pada kedekatan seseorang terhadap calon anggota legislatif, karena kedekatannya dengan agama yang dianut, atau juga pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Leo Agustino merumuskan sebagai berikut :

- a) Keyakinan sosiokeagamaan dimana keyakinan keagamaan merupakan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi politik seseorang. Meskipun kasusnya berbeda, gambaran yang sederhana untuk menunjukkan hal tersebut dapat merujuk pada penelitian Geertz, menurutnya kaum santri (memiliki ke-Islaman lebih kental dibandingkan dengan kaum abangan) akan secara pasti memilih calon anggota legislatif yang diidentifikasi oleh rakyat pemilih sebagai person yang memiliki nilai ke-Islaman yang lebih tinggi dibanding calon legislatif yang lainnya. Sedangkan mereka yang mengidentifikasikan dirinya sebagai kaum abangan, akan memilih calon anggota legislatif dari kelompok abangan pula, bahkan non Islam pula.
- b) Pola Kedaerahan, misalnya ada dua calon anggota legislatif, calon pertama dari luar kota Bandung (meskipun ia telah lama tinggal di kota Bandung) dan calon kedua dari kota Bandung sendiri (variannya dapat dibesarkan diluar kota Bandung atau tidak), dan bilamana seseorang pemilih dari luar kota Bandung

yang kebetulan berasal sama dengan calon legislatif dari daerah pertama, dan begitu pula sebaliknya.

- c) Pola Kepemimpinan, biasanya sikap pemilih khususnya masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin non formal, seperti kyai-kyai atau keturunan darah biru daerah dan lain sebagainya. Kembali merujuk pada pandangan Geertz, dimana sikap kaum santri akan sangat dipengaruhi oleh petuah dari kyai-kyai, sedangkan sikap pemilih kaum abangan akan banyak dipengaruhi oleh peran guru. Dan bila para kyai meminta santrinya memilih calon anggota legislatif atau para guru meminta muridnya untuk memilih salah satu anggota legislatif tertentu, kesemuanya itu dilakukan oleh para santri atau para muridnya, maka tindakan tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan psikologis”.⁴²

Pendekatan psikologis memperkenalkan apa yang disebut sebagai budaya demokrasi atau *civic culture* yang kemudian akan disebut sebagai budaya partisipasi politik dan dapat menjelaskan tentang partisipasi politik. Pada dasarnya pendekatan psikologi ini memiliki definisi yang hampir sama dengan model perilaku politik, dimana perilaku untuk memilih pada suatu Pemilihan Umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi

⁴² Leo Agustino. 2005. *Perihal Ilmu Politik*. Graha Ilmu, Yogyakarta. H. 2 dikutip oleh Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, *Artikel* (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h. 9.

pemilih atas partai-partai yang ada atau ketertarikan emosional pemilih terhadap suatu partai tertentu. Secara jelas, partai yang memiliki ketertarikan secara emosional dirasakan sangat dekat dengan pemilih merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.⁴³

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pendekatan psikologis ini terdapat dua indikator, yaitu :

- a) Identifikasi kandidat, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan ikatan emosional pemilih dengan figur kandidat.⁴⁴
- b) Ketokohan, dilihat dari calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.⁴⁵

3) Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional berkaitan dengan pola perilaku pemilih masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kualitas kandidat. Pemilih benar-benar rasional dan sangat memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menggunakan hak pilihnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut berupa apa untung dan ruginya apabila pemilih mempergunakan hak pilihnya untuk

⁴³Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992) H. 187.

⁴⁴Agus Muslim, "faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat", (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h 9 diakses pada bulan oktober 2019.

⁴⁵ *Ibid.*

memilih partai tertentu atau kandidat tertentu, hal ini dikarenakan pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan informasi yang cukup, tindakan mereka bukanlah karena kebetulan atau pun disengaja.⁴⁶

Dalam pendekatan rasional ini pemilih cenderung memikirkan hal apa yang akan didapat dari memilih seorang kandidat. Pendekatan ini berdasar pada isu apa yang sedang terjadi sehingga isu tersebut dapat mempengaruhi pilihan politik. Dengan kata lain, pemilih tidak memikirkan apa yang menjadi konsep politis yang diberikan melainkan bertumpu pada keuntungan yang didapat jika pemilih memilih kandidat tersebut. Maka dari itu pemilih pemula dianggap sebagai sumber atau penghasil suara yang cukup signifikan karena mereka (pemilih pemula) mudah terpengaruh dan dipengaruhi.

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendekatan rasional merupakan pendekatan yang melihat bahwa pilihan pemilih adalah keputusan rasional pemilih yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a) Orientasi visi dan misi yang diukur dari pengetahuan dan pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program yang ditawarkan calon

⁴⁶ *Ibid.*

- b) Orientasi kandidat yang diukur dari kualitas kandidat meliputi kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan terkait kompetensinya dalam merealisasikan program yang ditawarkan.⁴⁷

Dari uraian di atas, ketiga pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataandi Negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh ketiga pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal, justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.⁴⁸

c. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- 1) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses inputdan output.

⁴⁷ Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h 11 diakses pada bulan oktober 2019

⁴⁸ Nico Purwanto, “Perilaku Memilih Santri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2017”, Artikel (online) tersedia di: <http://digilib.unila.ac.id/30879> diakses pada januari 2020.

- 2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- 3) Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.⁴⁹

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni⁵⁰:

- 1) Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Partisipasi politik spectator orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- 3) Partisipasi politik gladiator yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- 4) Partisipasi politik pengritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.⁵¹

⁴⁹Nico Purwanto, "Perilaku Memilih Santri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2017", Artikel (online) tersedia di: <http://digilib.unila.ac.id/30879> diakses pada januari 2020.

⁵⁰A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2007), h.288.

⁵¹*Ibid.*

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicitakan sehingga lebih menjurus kedalam partisipasi politik yang apatis.⁵²

Dalam praktiknya ada dua bentuk partisipasi, seperti yang disebutkan Almond, yaitu⁵³:

1) Bentuk partisipasi konvensional

Partisipasi konvensional yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh warga negara untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh dari partisipasi konvensional yaitu, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif.

2) Bentuk Partisipasi non-konvensional

Partisipasi non-konvensional yakni warganegara mempengaruhi proses yang dapat merubah hasil. Contoh dari partisipasinon-konvensional ini adalah demonstrasi.⁵⁴

⁵² A. Rahman H.I .*Ibid*.

⁵³ Nico Purwanto, "Perilaku Memilih Santri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2017", Artikel (online) tersedia di: <http://digilib.unila.ac.id/30879> diakses pada januari 2020.

⁵⁴ Nico Purwanto, "Perilaku Memilih Santri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2017", Artikel (online) tersedia di: <http://digilib.unila.ac.id/30879> diakses pada januari 2020.

d. Tujuan dan Fungsi Partisipasi Politik

1) Tujuan Partisipasi Politik

Keterlibatan politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan, diantaranya yaitu:

a) Memberikan rakyat kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, untuk mengontrol pemerintah yang akan terpilih dan menjadi alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau grup yang mempengaruhi pemerintah melalui jalan terlibat dalam politik.⁵⁵

b) Menjadi alat untuk mengontrol rakyat sehingga mencegah terjadinya pemberontakan oleh rakyat, dan menjadi sebuah cara untuk meningkatkan dukungan tanpa bantahan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.⁵⁶

2) Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Robert Lane, terdapat empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu, yaitu:⁵⁷

- a) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis
- b) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.

⁵⁵ Bung El. "Partisipasi masyarakat dalam politik". Artikel (on-line) tersedia di: <https://elpakpahan.wordpress.com/2013/09/19/partisipasi-masyarakat-dalam-politik/> diakses pada tanggal 7 januari 2020

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Michael Rush dan Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: PT.Rajawali 1989) h. 131.

- c) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
- d) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan psikologis tertentu.

Partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah, sebagai berikut:

- a) Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program pemerintah.
- b) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.⁵⁸

2. Pemilih Pemula

a. Teori pemilih pemula

Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 22 UU NO 10 Tahun 2008 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat 1 dan 2 UU NO 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar

⁵⁸Said Gatara dan Moh. Dzukiah Said. *Sosiologi Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007) h. 67.

pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.⁵⁹

Pemilih pemula belum mempunyai pengalaman memilih dalam pemilu dan perlu mengetahui serta memahami berbagai hal terkait dengan pemilu. Seperti, untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu dan sebagainya.⁶⁰ Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, mengapa demikian, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, dan tipis akan pragmatisme.⁶¹

b. Ciri-ciri Pemilih Pemula

Sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat 22 pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU NO 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar

⁵⁹ UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (On-line), tersedia di : http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_10.pdf diakses pada tanggal 13 juli 2019 pukul 13:39 wib

⁶⁰ Azwar, "Mencerdaskan Pemilih Pemula". Artikel (on-line) Tersedia di: <http://www.ressay.wordpress.com.2008> (diakses pada tanggal 10 januari 2020)

⁶¹ Pragmatisme berasal dari bahasa yunani yang berarti tindakan. Pragmatisme adalah filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan dari kehidupan nyata. (dikutip dari: <https://www.slideshare.net/mobile/chikoys/filsafat-pragmatisme-dalam-pendidikan> diakses pada tanggal 10 januari 2020)

pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.⁶²

Selain uraian diatas disebutkan pula bahwa Pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.⁶³

Maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula, yaitu:

- 1) Seorang pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin.
- 2) Seorang pemilih pemula adalah seseorang yang baru menggunakan hak pilihnya (memberikan suara)
- 3) Seorang pemilih pemula yang mempunyai hak pilih telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu.⁶⁴

c. Pembelajaran Politik pada Pemilih Pemula

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau meberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagi pemilih pemula dan secara umum bagi masyarakat.

⁶² UU No 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (On-line), tersedia di : http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_10.pdf diakses pada juli 2019 pukul 13:39 wib

⁶³ Asmika Rahman. "Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*: Volume 10 No 1, (tahun 2018). H 48

⁶⁴ Nasriaika. *Pemilih Pemula*. Artikel (Online) Tersedia Di: <https://www.google.com/amp/s/nasriaika1125.wordpress.com/2013/06/18/pemilih-pemula/amp/> Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2020

Menurut Kantraprawira, pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.⁶⁵

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti berpendapat bahwa:

“Sosialisasi politik dibagi menjadi dua yaitu, pendidikan politik dan indoktrinasi politik”⁶⁶. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.”⁶⁷

Berdasarkan pendapat Surbakti diatas bahwa pendidikan politik sebagai sarana sosialisasi politik kepada warga negaranya. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat pada umumnya dan para pemilih pemula khususnya untuk lebih mengenal sistem politik yang ada di Negara Indonesia. Sehingga diharapkan sosialisasi pendidikan politik sebagai sarana untuk membentuk sikap orientasi politik.⁶⁸

Tujuan adanya pembelajaran politik pada pemilihan pemula yaitu agar sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan

⁶⁵Kantraprawira. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo) H 40.

⁶⁶ Indoktrinasi Politik Adalah Suatu Proses Atau Kegiatan Yang Dilakukan Dengan Berdasarkan Suatu Sistem Nilai Untuk Menanamkan Ideologi, Sikap, Sistem Berfikir, Gagasan, Kepercayaan tertentu, dan perilaku. Artikel online. Tersedia di: <https://gurupkn.com/perbedaan-sosialisasi-politik-dan-indoktrinasi-politik/amp> diakses pada tanggal 17 Januari 2020

⁶⁷Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia, 1999) H 117.

⁶⁸ *Ibid.* H 118.

kewarganegaraan sebagai pendidikan politik⁶⁹. Selain itu, untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab.⁷⁰

Pendidikan politik berperan penting sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat pemilih pemula lebih “*melek*” politik. Pemilih pemula yang “*melek*” politik adalah pemilih pemula yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan bernegara disetiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi penerus bangsa.⁷¹

Salah satu peran penting lainnya yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu sebagai warga masyarakat yang berfikir kritis, dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kepada pemilih pemula pada tiga hal, yaitu:

- 1) Demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara masyarakat itu sendiri.

⁶⁹ Asmika Rahman. “Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*: Volume 10 No 1, (tahun 2018). H 45.

⁷⁰ Santoso. *Pendidikan politik terhadap pemilih pemula*. Artikel (online) tersedia di: <https://eprints.umk.ac.id/6057/3/artikel.pdf> diakses pada tanggal 10 januari 2020.

⁷¹ *Ibid.*

- 2) Demokrasi adalah suatu proses pembelajaran yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain.
- 3) Kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi: kebebasan, persamaan dan keadilan serta loyal pada sistem politik yang bersifat demokratis.⁷²

Adapun bentuk dan proses pendidikan politik, yaitu:

- 1) Bentuk dan proses yang bersifat tertutup, yaitu kegiatan berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non-politis, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja, ataupun lingkungan sekolah atau kampus.
- 2) Bentuk dan proses yang bersifat terbuka, yaitu kegiatannya berlangsung dalam lembaga politik tertentu termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya.⁷³

Adapun bentuk lain seperti, Bahan bacaan seperti, surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum. Siaran radio, televisi (audio media visual).⁷⁴

⁷² Santoso. *Pendidikan politik terhadap pemilih pemula*. Artikel (online) tersedia di: <https://eprints.umk.ac.id/6057/3/artikel.pdf> diakses pada tanggal 10 januari 2020

⁷³ Asmika Rahman. "Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*: Volume 10 No 1, (tahun 2018). H 47

⁷⁴ Ibid

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Menurut Milbrath, dikutip dalam buku Pengantar Sosiologi Politik karya Rafael Maran, menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik.⁷⁵

Lima faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain:

1) Adanya perangsang politik.

Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi formal maupun informal. Semakin peka atau terbuka seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak pribadi atau organisasi atau media masaa semakin, semakin besar juga seseorang untuk berpartisipasi.

2) Faktor karakteristik pribadi seseorang.

⁷⁵ Raga Maran. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rineka Cipta Indonesia, 156) dikutip oleh Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, *Artikel* (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h. 6

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.

3) Karakteristik sosial.

Menyangkut status sosial ekonomi, kelompokras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

4) Situasi atau lingkungan politik itu sendiri.

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

5) Pendidikan Politik.

Adapula yang menambahkan pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok atau individu yang melaksanakan partisipasi politik.

Berdasarkan uraian diatas, faktor yang menjadi motivasi pemilih pemula dalam berpartisipasi politik pada kegiatan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu adanya perangsang politik karena pemilih pemula selalu berdiskusi dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan diantaranya tentang politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain sebagainya baik dilakukan secara formal ataupun informal. Faktor karakteristik pribadi, karena sebagian besar pemilih pemula merupakan seorang pelajar/mahasiswa namun juga mempunyai kepedulian besar terhadap problem sosial, ekonomi, sampai mau terlibat dalam aktivitas politik. Karakteristik sosial seseorang, karena pemilih pemula menghargai nilai keterbukaan serta kejujuran, keadilan sampai pada akhirnya mau menegakkannya dalam bidang politik, dengan kata lain berpartisipasi dengan mempunyai misi. Situasi yang kondusif, pemilih pemula berpartisipasi dalam politik dengan asas demokrasi. Serta faktor pendorong secara internal adalah pendidikan politik secara nasional serta memulai eksistensi atau anggotanya.⁷⁶

Selain faktor pendukung, disebutkan pula faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Faktor penghambat dapat membuat seseorang untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilu.

Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain⁷⁷ :

⁷⁶ Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h 7 diakses pada bulan oktober 2019.

⁷⁷ *Ibid.* H 7

1) Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah.

Maksud dari kebijakan induk selalu berubah yaitu, organisasi atau badan yang dipandang elite politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi.

2) Pemilih Pemula yang Otonom.

Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi.

3) Dukungan yang Kurang Dari Induk Untuk Mensukseskan.

Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula, komunikasi dengan induk organisasi harus terjalin baik dan tetap harus diperhatikan.⁷⁸

3. Partisipasi Politik dalam Fikih Siyash

a. Bentuk Pemilihan Umum dalam Islam

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk bagaimana cara memilih pemimpin. Agama islam tidak memberikan batasan untuk memilih

⁷⁸Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, *Artikel*(on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019)

metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarenakan dalam Islam (hukum islam) mempunyai tujuan yaitu tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin.⁷⁹ Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya mereka berdasarkan metode sejaalan dengan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.⁸⁰

Menurut ajaran islam, seperti yang dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah yang menciptakan dan sungguh-sungguh mentolelir atau mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum, yang tentunya didalam arti terbatas, yaitu dalam batas-batas keizinan Allah.⁸¹ Tercantum dalam al-Qur`an Surat al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S al-Ahzab ayat 36)

Ayat diatas menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan rakyat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, namun masih ada yang

⁷⁹Sodikin. “Pemilihan umum menurut hukum islam”. *Jurnal Ahkam*: Vol.XV No.1 (Januari 2015). Hlm 60.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Kasman Singodimedjo. Masalah kedaulatan (Jakarta: Bulan Bintang.1978) h 24 dikutip oleh Sodikin. “Pemilihan umum menurut hukum islam”. *Jurnal Ahkam*: Vol.XV No.1 (Januari 2015). Hlm 61.

lebih berdaulat atau berkuasa yaaitu Allah Swt. Disini suara rakyat bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat.

Dipertegas kembali oleh Kasman Singodimedjo bahwa:

“Mengenai kedulatan rakyat atau umat, sesungguhnya rakyat atau umat tidak dapat dikatakan berdaulat dalam arti berkuasa penuh, karena mereka itu tetap saja manusia-manusia yang sifatnya dhaif atau lemah sebagai makhluk”.⁸²

Dengan demikian, dikenal pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat di antara mereka. Di dalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya sudah mengenal metode untuk memilih pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang sekarang dikenal pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang dimaksud versi demokrasi barat.⁸³

b. Sejarah Pemilu Dalam Islam

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya, Baiat *al-Nuqoba* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi Saw. di ‘Aqabah. Saat itu, Nabi Saw.

⁸²Kasman Singodimedjo. Masalah kedaulatan (Jakarta: Bulan Bintang.1978) h 24 dikutip oleh Sodikin. “Pemilihan umum menurut hukum islam”. *Jurnal Ahkam*: Vol.XV No.1 (Januari 2015). Hlm 62.

⁸³*Ibid.*

bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.⁸⁴

Begitu juga periode sesudah Nabi Saw. yaitu pada masa *al-khulafaur Rasyidin*. Pemilihan umum yang dikenal pada masa *al-Khulafaur Rasyidin* dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing khalifah yang terpilih. Janji setia (baiat) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga di sini ada keterlibatan dan peran rakyat dalam baiat khalifah.⁸⁵

Pada saat pemilihan Abu Bakar yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abu Bakar, yaitu 'Umar bin Khaththab, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyir ibn Sa'ad, Asid ibn Khudayr dan Salim, seorang budak Abu Khudzayfah yang telah dimerdekakan. Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan 'Umar bin Khaththab yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana Khalifah Abu Bakr. Meskipun demikian, 'Umar bin Khaththab menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika 'Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa barang siapa membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat

⁸⁴Sodikin. "Pemilihan umum menurut hukum islam". *Jurnal Ahkam*: Vol.XV No.1 (Januari 2015). Hlm 62.

⁸⁵*Ibid.*

terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.⁸⁶

Riwayat tersebut adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin).⁸⁷ Meski tidak ada dokumen sejarah yang ditemukan dalam sejarah Islam pada pemilu, tetapi ketiadaan dokumen tidak berarti bahwa Islam tidak memiliki konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kemanusiaan.

Dari sejarah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bagaimana cara memilih dan menentukan seorang pemimpin. Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat disimpulkan yaitu:

- 1). Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan ridha rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *Khulafaur Rasyidin* yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.⁸⁸
- 2). Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi

⁸⁶Hadis riwayat al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî, Bâb Rajmal-Hublâ fî al-ZinâIdzâ Ahshanat*, No. 6830, dikutip oleh Sodikin. *Pemilihan umum menurut hukum islam. Jurnal Ahkam: Vol.XV NO I* Januari 2015. Hlm 62.

⁸⁷Sodikin. *Ibid.* hlm. 63.

⁸⁸Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ahkam: Vol.XV NO I* Januari 2015. Hlm 63.

seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.⁸⁹

Menurut pendapat al-Mawardi dalam memilih seorang pemimpin mempunyai dua cara yakni: pertama, dipilih oleh Dewan *ikhtiyar* (pemilih) yang bertugas untuk memilih seseorang sebagai pemimpin negara dan umat. Kedua, Dewan *imamah* (pemimpin) yang bertugas untuk mengangkat seseorang dari mereka sebagai imam.⁹⁰

Pemilihan pemimpin di Negara Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu. Pemilu diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada ditangan umat atau rakyat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi *khalifah*.⁹¹

Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa, pandangan Islam mengenai pemilu dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam bernegara apabila negara yang bersangkutan memilih dengan cara demokrasi sebagai satu-satunya dalam bernegara dan bermasyarakat. Perlu diingat, demokrasi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan syariat.

⁸⁹ Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*: Vol.XV NO I Januari 2015. Hlm 63.

⁹⁰ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah Islam)* terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisti Pers, 2015) h 3

⁹¹ Sodikin. *Ibid*. Hlm 64.

c. Teori Konsep Syuro

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat. *Syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.⁹² Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.⁹³

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban ke-Islaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *an-nash* Alquran dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya. Disebutkan dalam hadis nabawi bahwa: pemisah antara seseorang dan antara kemusyrikan serta kekafiran adalah salat, maka kami berkata: Bahwa pembatas antara hukum Islam dan antara hukum *dictatorial*⁹⁴ adalah meninggalkan musyawarah.”⁹⁵

Jika musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik dalam pemikiran politik barat, maka prinsip *amar ma'ruf nahi*

⁹²M.Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, h.18.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴ Hukum *dictatorial* adalah sebuah hukum yang dianut suatu negara yang dipimpin oleh pemimpin otoriter yang mempunyai hak dan kewajiban absolut, biasanya dipraktikkan di negara-negara Eropa.

⁹⁵Farid Abdul Khaliq. *Fiqih politik Islam*, (Jakarta: Amzah 2005), hal.35

mungkar yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah “semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi mungkar*, pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan, berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberi nasehat yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW.⁹⁶

Ada ayat yang menyebutkan secara jelas akan adanya musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat itu mempunyai petunjuk masing-masing. Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran:159, yaitu:



فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.⁹⁷ Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran ayat 159)

⁹⁶Farid Abdul Khaliq. Ibid. H 29

⁹⁷ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Menurut Farid Abdul Khaliq, ayat diatas adalah perintah wajib melakukan musyawarah. Sekalipun ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi Negara Islam disetiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di Negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan Negara.⁹⁸

Selain ayat diatas, terdapat ayat al-qur'an lainnya yang menjelaskan betapa pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan perkara dan menegakkan hukum sesuai dengan perintah syariat. Karenanya, ayat-ayat yang memberi isyarat pada penegakkan hukum sesuai apa yang diturunkan oleh Allah, merupakan dalil akan kewajiban menegakkan imamah,⁹⁹ tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 48-49:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً

⁹⁸Farid Abdul Khaliq. *Fiqh politik Islam*, (Jakarta: Amzah 2005), H 29

⁹⁹Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014) h. 78

وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
 ءَاتَكُمُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
 تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Ayat (48) “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian¹⁰⁰ terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu,¹⁰¹ Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu

Ayat (49) “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah),

¹⁰⁰ Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya.

¹⁰¹ Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.

Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S al-Maidah ayat 48-49)

Dari uraian diatas, kita dapat melihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Selain merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁰²

Demikian pun dalam hal berpartisipasi politik, pro dan kontra itu biasa, ketika mereka terdapat perbedaan dalam memilih kandidat, yang mereka lakukan adalah menyelesaikannya secara baik-baik dengan tidak memaksakan kehendak orang lain agar sama dengan kehendak diri sendiri. Jadi, tidak ada pertikaian diantara mereka dan hidup berdampingan.¹⁰³

d. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Partisipasi Politik

Kata fiqih berasal dari kata *fuqoha-yafqahu-fiqhan* .Secara bahasa Fiqih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).

¹⁰²Farid Abdul Khaliq. Ibid. 30

¹⁰³Ibid h 30

Dari defenisi tersebut dapat di pahami fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara` sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.¹⁰⁴

Sedangkan siyasah berasal dari kata *saa-sa* yang berarti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat keputusan. Secara harfiyah siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan.¹⁰⁵

Fikih siyasah adalah hukum Islam yang objek pembahasannya tentang kekuasaan. Secara sederhana, fikih siyasah meliputi hukum tata Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Fikih siyasah pun membahas tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara atau anatr negara atau didalam kebijakan-kebijakan, ekonominya baik nasional ataupun internasional.¹⁰⁶

Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang memeluknya. Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Menegakkan *imamah* merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin maka akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadia Group, 2014), h.2.

¹⁰⁵ A. Dzajuli. *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018) hlm 25.

¹⁰⁶ *Ibid.* H. 147.

dari adanya kerusakan. Adapun dalil yang menunjukkan adanya kewajiban seorang pemimpin terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa ayat 59)

Syarat dalam bermasyarakat dan bernegara adalah harus ada seorang pemimpin dan peraturan yang ditaati. Tanpa adanya pemimpin dan peraturan, dapat terjadi kekacauan di masyarakat dan kehancuran negara. Pengalaman dalam perang Uhud dapat menjadi contoh, kekalahan umat Islam disebabkan karena sebagian pasukan tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu pentingnya taat kepada pemimpin atas perintahnya merupakan hal yang penting untuk tujuan bersama.¹⁰⁷

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya Rasulullah mewajibkan ada tiga orang untuk mengangkat seorang pemimpin dari mereka, padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan

¹⁰⁷Syaifuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepimpinan Dalam Al-Quran Sebuah Kajian Hermeneutik*. (pontianak: ayunindya, 2018) h 30

dalam kondisi yang sifatnya insidentil, yakni *safar*, ini merupakan standar bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar).¹⁰⁸

Membahas tentang masalah pemimpin, Menurut al-Mawardi, seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan *Imamah* atau *khilafah* direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia. Berdasarkan ijma` ulama adanya pelembagaan *imamah* atau *khilafah* adalah *fardu kifayah*.¹⁰⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Oleh sebab itu, masyarakat wajib menaati perintah atau aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintahan selama semua produk tersebut secara substansial tidak menentang dengan syariat, dan itu termasuk suatu bentuk usaha dukungan atau disebut dengan ikut berpartisipasi.¹¹⁰

Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai

¹⁰⁸ Nurcholis Majid, *Islam: Doktrin dan Peradaban*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008) h. 14

¹⁰⁹ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)* terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisti Pers, 2015) h 10

¹¹⁰ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2012) hlm 19

dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S an-Nisa ayat 58)

Kita dapat melihat bahwa ayat diatas menjelaskan Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.¹¹¹

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dilakukan agar penulis mengetahui hal-hal apa yang diteliti dan apa yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Adapun hasil karya skripsi

¹¹¹ A. Dzajuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003) H.25

dan karya ilmiah lainnya yang penulis temukan, terkait dengan pembahasan tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai Pemilih Pemula”

1. Rofik Anwar, skripsi yang berjudul “*Partisipasi Politik Santri Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pilpres 2014*”. Pada penelitian skripsi tersebut, secara kajian teori terdapat beberapa hal yang sama dengan skripsi ini. Persamaannya antara lain terletak pada subjek yang diteliti yaitu Santri, dan peristiwa yang diteliti yaitu pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya berbeda pada tahun pelaksanaannya. Dan hasil penelitian tersebut yaitu gambaran kondisi partisipasi politik santri di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Akan tetapi, perbedaan pada skripsi ini lebih mengerucut dalam membahas permasalahan partisipasi politiknya yaitu membahas hal-hal yang mempengaruhi partisipasi politiknya.

2. Agus Muslim, karya Ilmiah yang berjudul “*faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat*”. Hasil penelitian dalam jurnal ini memfokuskan pada kondisi dan presentase jumlah pemilih di Kecamatan Andir pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013.
3. Sodikin, jurnal Ahkam: Vol.XV NO I bulan Januari 2015 yang berjudul “*Pemilihan umum menurut hukum islam*”. Hasil jurnal ini mengemukakan bahwa dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (*uslub*) yang biasa digunakan untuk

memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal ini, meskipun hukum asal pemilu itu sebagai *uslub* adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, *uslub* itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balances* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, *uslub* ini digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Selama proses pengumpulan bahan pustaka, belum ditemukan yang secara khusus mengkaji masalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri sebagai pemilih pemula. Adapun skripsi, jurnal ataupun beberapa opini pengamat politik atau berita-berita yang dimuat dalam surat kabar dan media sosial, hanyalah gambaran tentang pemilih pemula dalam pemilu secara umum dan tidak masuk pada faktor yang mempengaruhi mereka. Jika pun ada, subjek yang diteliti adalah pemilih pemula masyarakat umumnya, sedangkan subjek yang penulis teliti adalah santri. Tentu saja Santri pemilih pemula berbeda dengan masyarakat umumnya. Akan tetapi, dalam hal ini penulis telah mencoba untuk meneliti literatur yang berkaitan dengan pemilih pemula dalam suatu pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an Karim

B. Sumber Buku

- Anwar, Rofik. 2014. *Skripsi: Partisipasi Politik Santri Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pilpres 2014*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- al-Mawardi, Imam. 2015. *Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah Islam)* terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisti Pers,
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Chalid Narbuka dan Abu Achmadi, 2013 *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara
- Dzajuli, Achmad. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. (Jakarta: Prenada Media Grup
- _____. (2003) *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Hadi, Sutrisno, 1973. *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosda Karya
- Herlambang, Syaifuddin. 2018. *Pemimpin Dan Kepimpinan Dalam Al-Quran Sebuah Kajian Hermeneutik*. Pontianak: ayunindya
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Kantraprawira. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo)
- Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah
- Labolo, Dr. Muhadam , *Partisipasi Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: ataeori, Konsep dan Isu Strategis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) H. 21.
- Masoed, M. Dan Andrews, C. 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Michael Rush dan Althoff. 1989. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rajawali

- Moloeng, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosda Karya
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik diIndonesia Pasca-Orde Baru* Jakarta:Gramedia
- Nursal. Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama.
- Rahman, Abdul H.I, 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Rahman, Maman. 1999.*Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIPPers
- Said Gatar dan Moh. Dzukiah Said. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIPPress
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, An R&D*, Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia
- Susiadi. 2014. *Metode Penelitian*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
- Syafiie, Inu Kencana 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Syahrial Syarbini (dkk), 2001. *Sosiologi Dan Politik*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Syamsuddin, M. Din. 2012. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu

C. Sumber Undang-Undang

UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (On-line), tersedia di : http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_22.pdf diakses pada tanggal 13 juli 2019 pukul 14:02 wib

UU No 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (On-line), tersedia di : http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_10.pdf diakses pada juli 2019 pukul 13:39 wib

D. Sumber Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anwar, Rofik. Skripsi yang berjudul “*Partisipasi Politik Santri Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Pilpres 2014*”.
- Muslim, Agus karya Ilmiah yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Andir-Jawa Barat*”.
- Rahman. Asmika *Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. 10 (1) 2018.
- Sodikin, jurnal Ahkam: Vol.XV NO I bulan Januari 2015 yang berjudul “*Pemilihan umum menurut hukum islam*”.
- Wagiyanto, M Jurnal Al-‘Adalah : Vol.16 No 1 tahun 2009 yang berjudul “*Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law*” yang artinya Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

E. Sumber Lainnya

- Agustino. Leo. 2005.*Perihal Ilmu Politik*. Graha Ilmu.Yogyakarta. H. 2
dikutip oleh Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat” ,
Artikel (on-line) tersedia di:
<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h. 8
- Artikel (online) tersedia di: <http://digilib.unila.ac.id/30879> diakses pada
januari 2020
- _____ <https://media.neliti.com/media/publications/12455-ID-pemilihan-umum-menurut-hukum-islam.pdf> diakses tanggal januari 2020
- _____ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/1223456789/41069> diakses
pada tanggal 10 Januari 2020
- _____ <https://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf> diakses pada
bulan januari 2020
- _____ <https://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html/m=1> diakses pada bulan januari 2020
- _____ <https://sensorku.blogspot.com/2013/10/makalah-tentang-pemilu.html?m>
diakses pada bulan januari 2020
- Asmawih, Hidayatullah (online) tersedia di:
<https://dayatfsh.blogspot.com/200/07/makalah.html?m=1> diakses pada
bulan Januari 2020

- Azwar, *Mencerdaskan Pemilih Pemula*. (on-line) Artikel. Tersedia di: <http://www.ressay.wordpress.com>.2008 (diakses pada tanggal 10 januari 2020)
- Frenki. M. Si, *Asas-asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah*. Jurnal (online) tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/1223/972> diakses pada bulan februari 2020
- Populasi dan Sampel. (online) tersedia di <https://lauraerawardani.blogspot.com/2014/05/populasi-dan-sampel.html?m=1> diakses pada bulan desember 2019
- Refka. Makalah Partisipasi Politik. (Tugas Kuliah Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2014) artikel (online) tersedia di: https://www.academia.edu/7698270/MAKALAH_PARTISIPASI_POLITIK_Makalah_Ini_Disusun_untuk_Tugas_Ujian_Tengah_Semester_Mata_Kuliah_Pengantar_Ilmu_Politik_Semester_Pendek_2014_oleh_REFKA_1310862013 diakses pada tanggal 21 Januari 2020
- Santoso. *Pendidikan politik terhadap pemilih pemula*. Artikel (online) tersedia di: <https://eprints.umk.ac.id/6057/3/artikel.pdf> diakses pada tanggal 10 januari 2020

F. Sumber Wawancara

- Wawancara dengan Fatia Hasna Azizah , Santri Putri Pesantren Roudlotussholihin pada bulan Januari 2020
- Wawancara dengan Fikri, Santri Putra Pesantren Roudlotussholihin pada bulan Januari 2020
- Wawancara dengan Hidayatus Sholihah, Wakil Ro`is Santri Putri Pesantren Roudlotussholihin pada bulan Januari 2020
- Wawancara dengan Nur Aida, Santri Putri Pesantren Roudlotussholihin pada bulan Januari 2020
- Wawancara dengan Nur Fadil, Santri Putra Pesantren Roudlotussholihin pada bulan Januari 2020
- Wawancara dengan Panji Kisworo, Santri Putra Pesantren Roudlotussholihin pada bulan Januari 2020
- Wawancara dengan Roro, Santri Putri Pesantren Roudlotussholihin pada bulan Januari 2020
- Wawancara dengan Tandes Diansyah Prayoga, Sekertaris Santri Putra Pesantren Roudlotussholihin pada bulan Januari 2020